

Islam dan Kebangsaan: Teori dan Praktik Gerakan Sosial Islam di Indonesia

(Studi atas Front Umat Islam Kota Bandung)

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Email: ajamilwahab@yahoo.com

Naskah diterima 19 Maret 2013

Abstract

Front Umat Islam (FUI) is one of religious social movements in West Java that is active in conducting many mass mobilizations to oppose matters that are considered deviating from Islamic teachings. Based on a qualitative approach, it is understood that the FUI can be regarded as a deviant social movement due to its approach in forcing the will of other believers whom they regard as defaming religion (Islam). However, their ideological and national concepts are moderate; politically they do not offer radical alternative to the current socio-political reality, FUI still respects the four pillars of Indonesian nationality, namely Pancasila, NKRI, UUD 1945, and Bhineka Tunggal Ika. Referring to the theory of social movement, as a movement that has a political objective and social capital, the activities of FUI are acceptable. FUI conducts social negotiation to realize social order in public sphere, namely Bandung which is religious.

Keywords: Islamic social movement; Nationalism concept; FUI in Bandung

Pendahuluan

Para pendiri negara ini dulu telah sepakat mendirikan negara Indonesia atas dasar Pancasila, mereka meyakini negara dan agama sebagai dua sisi mata

Abstrak

Salah satu organisasi sosial keagamaan di Jawa Barat, yang aktif melakukan berbagai aksi pengerahan massa untuk menentang hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam adalah Front Umat Islam (FUI) Kota Bandung. Melalui pendekatan kualitatif diketahui bahwa aksi-aksi FUI yang ingin memberantas praktik-praktik yang menyalahi agama dan bersifat memaksakan kehendak bisa dikategorikan sebagai suatu gerakan yang menyimpang (social deviance). Namun demikian konsepsi ideologis dan wawasan kebangsaannya bersifat moderat, dalam arti secara politik tidak menawarkan alternatif radikal terhadap kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung, karena FUI tetap menghormati empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Jika ditinjau dari teori gerakan sosial maka aktivitas FUI merupakan hal yang wajar, sebagai sebuah gerakan yang mempunyai tujuan politis dengan memanfaatkan sosial capital-nya dan melakukan proses negosiasi sosial untuk mengisi ruang publik (public sphere) dalam mewujudkan tatanan sosial yaitu Bandung yang agamis.

Kata kunci: Gerakan Sosial Islam, Wawasan Kebangsaan, FUI Kota Bandung.

uang yang saling melengkapi. Indonesia bukanlah negara agama, karena tidak menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara secara formal, bukan pula negara sekuler karena tidak ada

pemisahan antara negara dan agama. Indonesia merupakan negara kebangsaan dengan kekhasan tersendiri, dimana Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum digunakan untuk mengikat berbagai kemajemukan yang ada, tanpa mengorbankan kepentingan agama, budaya maupun negara itu sendiri. Islam dan negara menjadi kesatuan integral yang memandu dan mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bersama, tanpa harus meletakkan Islam sebagai label negara (Natsir, Muhammad. 1973 : 429-450).

Namun demikian, bagi sebagian kelompok Gerakan Sosial Islam hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang belum final. Beberapa kelompok Islam pernah melakukan demonstrasi didepan gedung DPR dan MPR, mereka menginginkan penegakan Syari'at Islam secara kaffah dan menginginkan dicantumkannya Syari'at Islam dalam konstitusi dengan dikembalikannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dulu sempat dihapus (Yunanto, S. 2003: 123-140). Padahal jika kita melihat sejarah perumusan Pancasila, maka penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, ketika itu umat Islam menerima dengan lapang dada, yang dilakukan semata untuk menjaga keutuhan NKRI (An-Nai'm, Abdullah Ahmed. 2007: 391-443).

Menurut Horace M. Kallan yang dikutip oleh Zada, (2002) Aspirasi beberapa kelompok Gerakan Sosial Islam tersebut sudah mengarah kepada dekonstruksi nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara, mereka mempertanyakan kembali konsep-konsep kebangsaan dan relasinya dengan Islam, bahkan cenderung menolak dan mempertanyakan kembali paham kebangsaan, NKRI, Pancasila serta UUD 1945, serta membenturkannya dengan Islam. Beberapa kelompok Islam juga ada yang melakukan tindakan kekerasan kolektif dengan sasaran tempat yang

diduga sebagai pusat-pusat kemaksiatan, maka untuk kasus Indonesia lahirlah berbagai terminologi untuk menyebut kelompok-kelompok tersebut seperti terminologi gerakan Islam radikal. Salah satu karakteristik gerakan radikal adalah keyakinan bahwa kelompok mereka yang paling benar. Meski dukungan masyarakat terhadap gerakan radikal tergolong rendah namun kehadiran organisasi Islam radikal bisa menjadi salah satu faktor yang meradikalisasi masyarakat menjadi intoleran. (SETARA Institute. 2010: 197 – 200).

Berpijak atas pemikiran tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian pandangan para tokoh gerakan sosial Islam, khususnya yang ada di Indonesia saat ini yang seakan berada dalam diaspora, pada satu sisi mereka sebagai warga negara yang seharusnya mendukung nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara, namun disisi lain cenderung menginginkan formalisasi Syari'at Islam dan Islam sebagai ideologi negara, mereka menolak dan mempertanyakan kembali paham kebangsaan, NKRI, Pancasila serta UUD 1945. Untuk itu, peneliti merasa tertarik untuk menelaah salah satu organisasi sosial keagamaan yang ada di Jawa Barat yaitu Front Umat Islam (FUI) Kota Bandung. Organisasi FUI Kota Bandung selama ini aktif melakukan berbagai aksi pengerahan massa untuk menentang hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Adapun sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa sajakah isu-isu yang diusung FUI Kota Bandung? bagaimana pandangan FUI Kota Bandung atas tidak ditetapkannya Syari'at Islam secara formal di Indonesia? bagaimana pandangan FUI atas nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara? Adakah pertentangan dalam teori maupun praktik antara paham keagamaan FUI dan paham kebangsaan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami (*to understand*) realitas sosial fenomena FUI secara mendalam, termasuk menentukan alasan-alasan dari tindakan sosial dan politik yang ada, kejadian-kejadian dan serangkaian episode sosial, dengan berbagai alasannya yang diderivasi dari para aktor sosialnya.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi deskriptif pada Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI dan lembaga terkait lainnya mengenai pandangan, ideologi maupun pemikiran dari gerakan sosial Islam lokal sehingga menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk melakukan tindakan secara preventif dan edukatif terhadap ideologi yang dikembangkan berbagai gerakan sosial Islam sejenis.

Landasan Teori

Gerakan sosial biasanya didefinisikan sebagai gerakan bersama sekelompok orang atau masyarakat yang terorganisir tetapi informal bersifat lintas kelompok untuk menentang atau mendesakkan perubahan. Banyak versi dan dimensi dari definisi gerakan sosial. Meyer dan Tarrow mendefinisikan gerakan sosial adalah tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas, ia menekankan kerangka konseptual bagi gerakan sosial yaitu: 1) adanya struktur kesempatan politik (*eksogen*), 2) mobilisasi sumberdaya (*indogen*), 3) budaya dan pembingkaiian sebagai “perantara” dengan poros utama *contentious politics*. (Wiktorowicz, Quintan.ed. 2012)

Sementara Diani (2000), menekankan pentingnya empat unsur

utama dalam gerakan sosial, yaitu (1) jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur. Dengan kata lain ada ikatan ide dan komitmen bersama di antara para anggota atau konstituen gerakan itu meskipun mereka dibedakan dalam profesi, kelas sosial, dll. (2) Ada *sharing* keyakinan dan solidaritas di antara mereka; (3) ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual. Ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan tertentu; (4) Aksi tuntutan itu bersifat kontinyu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi atau agama, misalnya.

Menurut Kruzman teori gerakan sosial Islam merupakan lompatan paradigmatis, hal ini dicapai lewat jalan yang panjang dan mengalami dua revolusi paradigmatis di dua teori berbeda tapi berjalan paralel yaitu: *pertama*, revolusi pada teori “perilaku kolektif” (*collective behavior*) yang berakar pada tradisi psikologi sosial. Pada teori ini, para aktor gerakan yang dulu dianggap kerumunan irrasional, kini subjek yang sadar dan rasional. *Kedua*, revolusi pada gagasan Orientalisme: studi Islam yang dulu menganggap Islam hanya dapat dipahami lewat kerangka yang khas untuk Islam saja (eksepsionalisme Islam), kini dipelajari dengan pola-pola umum sebagaimana tradisi agama lain. Masih menurut Kruzman, melalui teori gerakan sosial maka para aktivis gerakan sosial Islam bukan lagi kaum fanatik liar dengan preferensi yang berbeda sama sekali dari para aktivis Barat. Mereka aktor rasional, merespons rangsangan dan membentuk gerakan dengan cara yang kurang lebih sama seperti para aktor lain di dunia (Wiktorowicz, Quintan.ed. 2012: 540).

Kajian Pustaka dan Metode Penelitian

Kajian tentang gerakan sosial Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti Indonesia maupun luar. Secara umum fokus kajian tersebut dapat dibagi dalam dua priode. *Petama*, tulisan-tulisan tentang gerakan sosial Islam yang terjadi sebelum 1980, umumnya dikaitkan dengan gerakan Komunisme atau Sosialisme yang dengan isu-isu atau aspirasi kelompok tertentu yang menuntut perbaikan nasib atau pergantian pemerintahan seperti kaum buruh, kaum tani, dan kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara tertentu, seperti GAM di Aceh dan pembebasan Muslim Moro dan sebagainya (Burke, E. and Lapidus, 1998).

Kedua, tulisan-tulisan tentang gerakan Islam setelah peristiwa 9/11, umumnya didominasi wacana gerakan Islam radikal atau fundamentalis seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat Al-Islamy di Pakistan; belakangan muncul Taliban dan Mujahidin di Afghaistan; FIS di Al-Jazair; revolusi Mullah di Iran dan seterusnya atau bahkan terorisme Islam serta perebutan kekuasaan dengan atas nama agama.

Di Indonesia kajian terkait berbagai gerakan sosial Islam yang termasuk kelompok fundamentalis atau radikal telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang bersifat nasional maupun transnasional. Namun penelitian untuk gerakan sosial Islam yang bersifat lokal, belum banyak dilakukan. Lembaga yang pernah melakukan kajian adalah SETARA Institute, beberapa gerakan lokal yang dikaji yaitu GARIS (Gerakan Reformis Islam) di Cianjur, FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah) di Cirebon, FAPB (Forum Anti Pemurtadan Bekasi) di Bekasi dan Tholiban di Tasikmalaya (SETARA Institute. 2010). Penelitian tersebut menyoroti radikalisme agama dan implikasinya terhadap jaminan

kebebasan beragama/berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat. Adapun kajian terhadap yaitu Front Umat Isam (FUI) Kota Bandung ini belum pernah dilakukan untuk itu penelitian ini adalah penelitian yang baru pertama kali dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian dilakukan selama 12 hari yaitu tanggal 25 s.d. 6 Oktober 2012, pengumpulan data dilakukan secara simultan memadukan antara analisis dokumen, wawancara terhadap para tokoh dan anggota FUI Kota Bandung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung, serta pengamatan terhadap unsur-unsur yang dianggap mendukung dan memberikan data terkait penelitian.

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, beberapa data yang diperoleh diverifikasi melalui sumber-sumber lain. Sedangkan analisis data dilakukan melalui *analysis interactive model* yang dikembangkan Miles dan Haberman (1987) yaitu melalui *data collection and timing, data display, data reduction and analysis, hingga conclusion*.

Temuan dan Pembahasan

Gambaran Umum Wilayah Kota Bandung

Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung berjarak sekitar 180 km dari Jakarta. saat ini dapat dicapai melalui Jalan Tol Cipularang dengan waktu tempuh antara 1.5 jam sampai dengan 2 jam. Untuk mengurangi kemacetan di pusat kota, Pada 25 Juni 2005, sebuah jembatan yaitu Jembatan Pasupati resmi dibuka, jembatan ini kemudian menjadi *landmark* baru bagi kota ini. Jembatan dengan panjangnya 2.8 km ini dibangun pada kawasan lembah

serta melintasi Cikapundu dan dapat menghubungkan poros barat ke timur di wilayah utara kota Bandung.

Sebagian besar penduduk Kota Bandung adalah suku sunda, yang bertutur menggunakan bahasa Sunda. Masyarakat sunda mengenal kata-kata sebagai filsafah hidup yang menggambarkan betapa kerukunan dan saling mengasihi antara warga masyarakat di sana, yaitu antara lain: *silih asah - silih asih - silih asuh*. Filosofi itu mengajarkan manusia untuk saling mengasih dengan landasan saling mengasihi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sejatinya itu suatu konsep kehidupan demokratis yang berakar pada kesadaran dan keluhuran akal budi.

Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki banyak potensi yang dapat diberdayakan. Disamping karena udara yang sejuk, Bandung juga memiliki tempat wisata yang hingga saat ini banyak dikunjungi para wisatawan, seperti Museum Asia Afrika, Gedung Sate, Kebun Binatang, Tangkuban Perahu, dan Trans Studio. Pada tahun 1990 Kota Bandung menjadi salah satu *kota teraman di dunia* berdasarkan survei majalah *Time*.

Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada jaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan *Parijs van Java* karena keindahannya. Kota Bandung juga dikenal dengan 'kota belanja' berbagai outlet pakaian, tas, jaket, dan sepatu seperti di kawasan Setia Budi, Cihampelas, dan Cibaduyut. Di Bandung berdiri perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (*Technische Hoogeschool te Bandoeng*)- TH Bandung, sekarang ITB (Institut Teknologi Bandung), saat ini

banyak perguruan tinggi di Kota Bandung yang diminati oleh para mahasiswa dari seluruh negeri, seperti UPI dan UNPAD.

Kota Bandung juga dikenal memiliki jargon Bandung Kota Agamis. Hal ini merupakan gambaran bahwa masyarakat Bandung relative sebagai masyarakat yang agamis, religious, memegang teguh nilai-nilai ajaran agama yang mereka anut. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat, kemudian Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Buddha, dan Konghucu. Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama tergambar dengan meningkatnya sarana peribadatan.

Pada awalnya kota Bandung sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan transformasi ekonomi kota umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi kota ini disamping terus berkembangnya sektor industri.

Meski masyarakat kota Bandung merupakan multi etnis dan agama masyarakat Bandung dalam kehidupan sehari-hari relatif terbuka dalam interaksi sosial. Masyarakat Bandung juga terbuka dan berinteraksi secara dinamis saat berinteraksi dengan nilai-nilai baru yang sering dinilai berbudaya sekuler.

Data Keagamaan

Untuk lebih memahami kondisi sosial masyarakat Kota Bandung, berikut ini beberapa data keagamaan yang diambil dari Kantor Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2011.

a. Tempat Ibadah

NO.	NAMA TEMPAT IBADAH	JUM-LAH	%
1	Masjid	2.514	54,05
2	Langgar	1,476	31,73
3	Mosholah	529	11,37
4	Gereja Katolik	27	0,58
5	Gereja Protestan	80	1,72
6	Pura	7	0,15
7	Vihara	17	0,36
8	Kelenteng	1	0,02
	Jumlah	4.651	100%

Data di atas menunjukkan jumlah tempat ibadah muslim yang terdiri atas Masjid, Musholah, dan Langgar sebanyak 96 % dari jumlah ibadat agama-agama lain.

b. Pemeluk Agama

NO	NAMA TEMPAT IBADAH	JUMLAH	%
1	Pemeluk Agama Islam	1.954.583	91,21
2	Pemeluk Agama Keristen Perotestan	116.034	5,41
3	Pemeluk Agama Katolik	54.539	2,54
4	Pemeluk Agama Hindu	5.831	0,27
5	Pemeluk Agama Buddha	11.006	0,51
6	Pemeluk Agama Konghucu	756	0,03
	Jumlah.....	2.142.749	100%

Sejarah Lahirnya FUI Kota Bandung

Front Umat Islam (FUI) Kota Bandung berdiri pada tanggal 3 Maret 2009. Susunan pengurus organisasi ini adalah: H. Hilman Firdaus (Ketua Majelis Syuro), H. Saeful Abdullah (Ketua Majelis Tanfidzi), dan Heri (Sekretaris). Saat ini sekretariat FUI adalah di Jalan Holis, no. 10, Bandung. Kini FUI juga sudah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang sudah di daftarkan di Notaris : Hj. Ai Masriah Roswandy, S.H. tertanggal 01-02-2011 nomor :1/Leg/2011.

Awalnya organisasi FUI adalah FPI Kota Bandung yaitu cabang dari organisasi FPI Pusat yang berkedudukan

di Jakarta pimpinan Abdul Riziq Sihab. Para pengurusnya kemudian keluar dari FPI dan mendirikan FUI. Alasan keluarnya FPI Kota Bandung dari keanggotaan FPI Pusat adalah karena perbedaan paham dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dakwah dalam Islam. Menurut Saeful Abdullah (Ketua Majelis Tanfidzi FUI), ada perbedaan cara FPI Pusat dalam berdakwah yang tidak sejalan dengan pengertian beberapa nash al-Quran yang ia pahami. Misalnya berdasarkan QS. An-Nahl ayat 125, tentang cara dalam berdakwah, cara berdakwah menurutnya adalah sesuai ayat tersebut harus dengan *bil hikmah*. Sedangkan FPI Pusat lebih berpegang pada al-Hadits yang menyatakan: "jika kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan kekuatan tangan", FPI Pusat mengartikan kekuatan tangan itu secara harfiah, sehingga aksi-aksi FPI Pusat akhirnya lebih banyak anarkis. Sikap anarkis yang sering ditonjolkan oleh FPI Pusat juga bertentangan dengan kata asal Islam yaitu *salima-yaslimu* yang artinya damai atau selamat. Sikap anarkis juga bertentangan dengan falsafah hidup yang terdapat dalam budaya Sunda, yaitu ajaran "*silih asah-silih asuh*" dan "*sikap andalenyi*", mereka yakin filosofi itu sebagai ajaran yang baik dan mulia yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Setelah melalui dialog dan diskusi dengan banyak pihak, akhirnya para pengurus FPI Kota Bandung sepakat keluar dari keorganisasian FPI Pusat dan mendirikan FUI (Front Umat Islam).

Fenomena berdirinya FUI dan keluarnya dari FPI merupakan hal yang wajar. Gerakan sosial Islam dimana-mana biasa mengalami perubahan, baik pada aspek ideologis maupun politis. Perubahan itu terjadi akibat dari situasi politik dan sosial yang terjadi, sehingga gerakan sosial Islam tersebut terpaksa merumuskan kembali agenda-agendanya.

Meski tergolong baru berdiri, namun saat ini FUI Kota Bandung telah masuk keanggotaan Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Kota Bandung yaitu paguyuban ormas-ormas sosial keagamaan se-Kota Bandung yang menjadi mitra Pemerintah Daerah Kota Bandung. FSOI merupakan forum yang beranggotakan 22 ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Persatuan Umat Islam (PUI), dan lain-lain. Sebagaimana organisasi-organisasi lainnya FUI juga menerima bantuan dana pembinaan ormas sosial keagamaan yang jumlahnya berpaarasi dari Pemda Kota Bandung, pada tahun 2012 ini, FUI menerima bantuan dana pembinaan ormas yaitu sebesar Rp. 18 juta.

Gerakan Sosial Keagamaan FUI Kota Bandung

Gerakan Melawan Kemaksiatan

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Untuk itu Bandung memiliki mobilitas sosial sangat tinggi dan memiliki dampak-dampak sosial sebagaimana kota metropolitan pada umumnya.

Dalam perspektif FUI, Kota Bandung memiliki daya tarik yang besar bagi para investor, mereka mendirikan banyak mall, outlet, pusat kuliner, hotel, hiburan, dan berbagai industri jasa lainnya. Di samping memiliki dampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ternyata juga telah menyuburkan banyak ragam kemaksiatan. Untuk itu menurut Hilman Firdaus (Ketua Majelis Syuro FUI), semua harus diwaspadai jangan sampai hal itu merusak citra Bandung sebagai Kota yang Agamis. Jika

tidak, maka beragam kemaksiatan dengan mudahnya muncul di Kota Bandung.

Banyaknya tempat hiburan yang menawarkan kemaksiatan, menurut Hilman Firdaus menggugah keperihatinan sejumlah tokoh agama, ia mengungkapkan :

“Masyarakat terutama tokoh agama resah, yang harus disalahkan jelas pemegang keputusan yaitu Pemkot Bandung, Satpol PP, Polisi. Karena kurang kencang dalam memberantas (kemaksiatan) ini”.

Namun ia juga mengakui, maraknya kemaksiatan juga karena kurang berperannya laskar dari berbagai ormas Islam di Kota Bandung. Untuk itu FUI Kota Bandung aktif dalam menyuarakan ditutupnya berbagai lokasi kemaksiatan di Kota Bandung. Misalnya saat mendengar akan dibukannya kembali Saritem yaitu tempat lokalisasi prostitusi yang dulunya sempat ditutup. Di tempat lain juga disinyalir terdapat kegiatan serupa seperti di kawasan Dewi Sartika dan sekitar Stasiun Bandung. Menyikapi hal tersebut FUI Kota Bandung meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak terkait agar kawasan prostitusi Saritem dan tempat perjudian ditutup kembali, khususnya selama bulan suci Ramadhan tahun 2012.

FUI juga aktif menuntut ditutupnya perjudian. Upaya itu relatif berhasil, menurut Hilman Firdaus peredaran miras di Kota Bandung kini mulai terkendali, di Kota Bandung berkat desakan sejumlah tokoh, kini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran minuman keras atau minuman beralkohol. Namun demikian, menurutnya itu tetap perlu untuk dikawal, sebab meski Perdanya sudah ada, tapi di lapangan penjualan miras masih tetap ada. Untuk itulah FUI tetap aktif mengawasi bagaimana implementasi Perda itu dilapangan.

Dalam melaksanakan aksi-aksinya FUI Kota Bandung berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang anarkis atau melawan hukum positif yang ada, ketika salah seorang anggotanya ada yang ingin membakar tempat prostitusi dan perjudian, Hilman Firdaus melarangnya. Menurutny anggota FUI tidak boleh berbuat anarkisme sebab itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ia juga melarang anggota FUI Kota Bandung membawa senjata tajam saat beraksi menyampaikan aspirasinya, mereka hanya boleh bawa tongkat untuk bendera. Mereka juga berkordinasi lebih dahulu dengan pihak berwenang di Kota Bandung seperti pemerintah daerah, kepolisian, bahkan TNI sebelum beraksi.

Untuk tindakan-tindakan yang bersifat represif, maka FUI mempercayakan pada aparat keamanan yaitu Satpol PP dan Kepolisian. Namun demikian, jika upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang, maka selanjutnya FUI yang akan bertindak. Dalam aksi menuntut penutupan Saritem misalnya H. Hilma menyatakan:

"Saya sudah minta ketegasan dari para Kapolsek seperti Andir dan lainnya, kalau memang mereka tidak tegas menanganinya apa boleh buat kita rakyat yang akan maju." (<http://www.inilahjabar.com>).

Saat menyambut bulan Ramadan 1413H yang jatuh pada pertengahan bulan Juli 2012, H. Hilman pernah mengancam akan membakar lokasi Saritem dan lokasi lainnya di Kota Bandung jika tetap beroperasi di bulan Ramadan.

"Kalau masih beroperasi bulan Ramadan kita bakar saja sekalian," Kata H. Hilman. (<http://www.inilahjabar.com>).

Dalam kasus demo kasus Ariel Peterpan, FUI juga menuntut agar vokalis Peterpan itu dihukum seberat-beratnya. Sebagaimana dilaporkan oleh banyak media, Senin (31/1) Pengadilan

Negeri Bandung menggelar sidang kasus video asusila Nazriel Irham atau Ariel di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat, ribuan massa yang pro maupun kontra memadati gedung Pengadilan tersebut. Sidang pembacaan vonis Ariel ini mendapatkan pengawasan ketat dari aparat kepolisian.

Menurut H. Hilman, tuntutan terhadap Ariel harus dilakukan oleh hakim, dalam kasus tersebut Jaksa Umum menuntut hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidi kurungan selama tiga bulan terhadap Ariel. Sementara kuasa hukum Ariel sebelumnya menuntut agar ia dibebaskan dari segala tuduhan, karena apa yang dilakukan Ariel tidak memenuhi tindak pidana. Menanggapi hal tersebut H. Hilman mengatakan: *"Jika Ariel ingin selamat maka dia harus dihukum, jika tidak dihukum maka laskar (massa) yang akan menghukum rajam Ariel."*

Dalam menjalankan aksi *amar ma'ruf nahimunkarini* pengurus FUI menanamkan kepada para anggotanya untuk sikap berani melawan kemungkaran. Sikap ini berhasil ditunjukkan oleh para pengikut FUI, menurut H. Hilma anggotanya akan lebih senang jika karena aksinya kemudian harus ditangkap polisi, dibanding harus buat bom dan kena bom seperti para teroris.

Upaya dan gerakan pemberantasan kemaksiatan yang ada di Kota Bandung oleh FUI diyakini sebagai bagian dari perjuangan jihad, FUI menggunakan jihad sebagai ruh dalam gerakan dan aksinya. Namun dalam hal ini FUI tidak setuju jika jihad dipahami sebagai perjuangan mengangkat senjata saja. FUI mempersepsikan jihad sebagai mencurahkan segala daya dan kemampuan untuk memperjuangkan kebenaran berdasarkan ajaran Islam. H. Hilman berpendapat jihad tidak identik dengan perang, dalam Islam perang tidak boleh dengan alasan menyebarkan

agama, sebab jika Islam disebarakan dengan pedang (perang) maka berarti ada pemaksaan, hal ini bertentangan dengan QS. al-Baqarah : 256. FUI juga tidak setuju jika jihad diartikan sebagai memerangi Barat atau melakukan pengerusakan terhadap segala kepentingan (asset) Barat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok teroris. Banyak pelaku teroris di Indonesia yang menganggap aksi-aksi teror mereka sebagai bagian dari jihad yang dianjurkan Islam, bahkan mereka menyebut yang meninggal dalam aksinya tersebut sebagai syahid. FUI menolak jika aksi teror dikatakan sebagai jihad dan memperoleh syahid.

Meluruskan Kesesatan Aqidah

FUI Kota Bandung juga aktif dalam menyoroti soal penistaan agama, misalnya dalam kasus Ahmadiyah, namun aksi yang dilakukan FUI dinilai beberapa pihak dilakukan dengan cara yang cukup ramah. Sekitar 12 orang anggota Front Umat Islam (FUI) Indonesia mendatangi Masjid Mubarak milik Ahmadiyah di Jalan Pahlawan 71 Kota Bandung sekitar pukul 10.00, pada tanggal 19 Maret 2012.

Kedatangan mereka dipimpin Ketua Dewan Syuro FUI Indonesia H. Hilman Firdaus. Mereka diterima langsung 4 perwakilan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Daerah Priangan Barat. Kedua organisasi yang nampaknya berseberangan tersebut menggelar dialog dengan kawalan ketat petugas kepolisian. Dalam dialog itu Hilman mempertanyakan sikap Ahmadiyah dalam menyikapi kondisi terakhir pasca keluarnya Pergub No 12/2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah di Jawa Barat.

Perwakilan Ahmadiyah mengaku, masih sangat menghormati pihak FUI karena datang dengan baik-baik. Juru Bicara JAI Daerah Priangan Barat mengatakan:

“Kami sangat menghormati kedatangan saudara dari FUI. Mereka silaturahmi, ya kami wajib menerima dan menyambut tamu. Apalagi datang dengan penuh perdamaian dan melalui prosedur pemberitahuan dulu. Tadi sudah disepakati kami meminta waktu selama seminggu untuk mendiskusikan pertanyaan yang diajukan FUI.”

Pascadialog tersebut, Hilman Firdaus menyampaikan bahwa ada sekitar 11 orang pengikut Ahmadiyah yang kemudian menyatakan masuk Islam. Acara masuk Islamnya kelompok Ahmadiyah ini disaksikan Walikota Bandung. Menurut Hilman, hal ini bisa terjadi karena FUI lebih mengutamakan *dakwah bil hikmah* bukan dengan *asyiddau ‘ala al-kuffar*, ini efektif ada beberapa pengikut Ahmadiyah yang berkat ajakan FUI mereka kembali masuk Islam.

Di samping terhadap Ahmadiyah, FUI juga nampaknya memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap penganut Syi’ah. Saeful Abdullah mengatakan: “Kami datang dan berdialog dengan para pimpinan Ahmadiyah juga dengan Syi’ah, kami menanyakan beberapa hal, nampaknya memang ada perbedaan madzhab. Sesuai dengan perintah dalam QS. An-Nahl, jika memang berbeda maka harus saling menghormati.”

Masih menurut Saeful Abdullah: “Tidak mudah memaksakan pendapat kita kepada Ahmadiyah juga Syi’ah, mereka mempunyai jaringan yang luas, organisasi mereka bagus dan kuat. Kita seharusnya banyak belajar pada mereka, dalam beberapa hal kita tertinggal. Perjuangan mereka di Bandung luar biasa, mereka membebaskan tanah dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang sangat maju. Ini adalah asset umat Islam yang luar biasa.”

Saiful Abdullah menyatakan, ia tidak setuju dengan pandangan yang mudah menyatakan sesat terhadap kelompok lain yang berbeda. Dalam

pandangan Saeful Abdullah, urusan kebenaran aqidah itu hubungannya dengan Allah. Biarkan itu menjadi pertanggung jawaban mereka di hadapan Allah, jangan sampai kita kemudian mengambil hak Allah seolah kita yang paling berhak untuk menyatakan bahwa ini benar dan tidak. Dari beberapa pernyataan tersebut nampak sikap FUI sangat toleran terhadap keberadaan paham agama kelompok lain meski hal itu berbeda dengan paham para tokoh FUI sendiri.

Konsepsi Kebangsaan

Banyak gerakan radikal Islam yang tidak secara eksplisit dalam perjuangannya ingin mendirikan Negara Islam. Beberapa pengamat menilai bahwa perjuangan mereka untuk mengembalikan Syari'at Islam dalam konstitusi negara adalah target antara, pada dasarnya mereka menginginkan berdirinya 'Negara Islam'.

Menyikapi hal tersebut FUI mengeluarkan Maklumat Front Umat Islam (*Islamic Community Front*) yang dikeluarkan pada September 2012 dan ditandatangani oleh Hilman Firdaus (Ketua Majelis Syuro), dan Saeful Abdullah (Ketua Majelis Tanfidzi). Maklumat tersebut menurut Saeful telah disebar ke semua anggota dan jaringan FUI. Isi maklumat tersebut adalah memuat 4 (empat) butir pernyataan yaitu:

Bismillahirrahmanir Rahim

FRONT UMAT ISLAM, meyakini bahwa seluruh persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ini (IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA), hanya dapat diselesaikan dengan keikutsertaan seluruh komponen bangsa/berpartisipasi secara nasional dalam INTEGRASI NASIONAL (AL-WAHDAAH AL-WATHANIYAH).

PERBEDAAN AGAMA, Suku, Ras dan Adat Istiadat (SARA), tidak boleh dijadikan KENDALA dan MASALAH, tetapi sebaliknya harus dijadikan POTENSI bahkan sebagian dari SOLUSI bagi pencapaian KEBAIKAN UMUM (AL-MASLAHAH AL'AMMAH)

KEARIFAN LOKAL, harus dihormati dan dihargai sebagai bagian dari kesatuan bangsa dengan sikap TASAMUH/TOLERANSI (ASAMUH FIL UMMAH)

INTEGRASI NASIONAL harus dikedepankan sebagai modal utama dalam mewujudkan pembangunan bangsa dan Negara Indonesia, menuju BALDAH THAYYIBAH WA RABBUN GHAFUR.

Tujuan dikeluarkannya maklumat tersebut, menurut Saeful Abdullah adalah untuk memperjelas posisi dan arah perjuangan FUI, jangan sampai eksistensi FUI sebagai ormas disalahpahami, FUI melalui maklumat ini menyatakan pentingnya integrasi nasional dan toleransi sebagai kunci utama dalam membangun Indonesia. FUI Kota Bandung menurut Saeful Abdullah sangat menghormati empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai bagian dari komponen bangsa, FUI juga mematuhi hukum formal yang ada dan menghormati pemerintahan yang sah. Menurut Hilman Firdaus dalam al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan kita untuk mematuhi pemerintah (*ulil amri*). Menurutnya ayat tersebut tidak harus dimaknai pemerintahan Negara Islam sebab dalam agama ada perintah *lakum dinukum waliyadin*, jadi ada kebebasan beragama, warga negara itu tidak harus Islam semua, Hilman menyatakan: "*lihat Nabi (di Madinah), mereka bisa akur*".

Dalam hal interaksi sosial, menurut Hilman, Nabi pernah menyatakan bahwa silaturahmi adalah ibadah yang

pahalanya melebihi beberapa ibadah-ibadah lain. Dalam pengertian ini, *silaturrahmi* harus dilakukan terhadap siapa saja, dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Bahkan menurutnya, Nabi juga menyatakan kita wajib berbuat baik dengan tetangga, ketika ditanya siapa saja tetangga itu ya Rasul? Nabi menjelaskan bahwa tetangga itu siapa saja yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Menurut Hilman, dari al-Hadits tersebut bisa dipahami, bahwa muslim tidak boleh membeda-bedakan antara tetangga Islam dan non Islam, sebab di Madinah ketika itu umat Islam juga bertetangga dengan Nasrani dan Yahudi.

FUI juga tidak setuju dengan upaya sebagian kelompok Radikal Islam yang berjuang untuk mendirikan Negara Islam. Ketika ditanya tentang hal ini H. Hilman menyatakan:

“Saya tidak se-ektrim Hizbuttahrir (mendirikan Khilafah Islamiyah). Menurut saya, kalau ingin membuat kebun kelapa, maka yang perlu dilakukan adalah menanam sebanyak mungkin pohon kelapa dan merawatnya. Tidak perlu membuat label “ini Kebun Kelapa”, maka insya Allah orang akan menyebutnya kebun kelapa. Demikian halnya jika ingin membuat kebun nanas, maka tanamlah sebanyak mungkin pohon nanas dan merawatnya jangan sampai ada pohon lain yang mengganggu nanas-nanas tersebut. Orang pasti akan menyebut kebun kita itu dengan kebun nanas, tanpa harus diberi merek atau label “Kebun Nanas”. Demikian halnya dengan Indonesia, maka caranya dengan mari mengajak masyarakat untuk mau menjalankan ajaran Islam dengan baik, nantinya masyarakat juga dengan sendirinya membutuhkan Syari’at Islam, jadi tidak perlu dengan mengganti Pancasila atau UUD 45.”

Hilman juga kemudian menegaskan bahwa mengamalkan substansi Islam

jauh lebih penting dibanding formalisasi Islam.

Analisis

Secara umum ada dua bentuk gerakan sosial Islam di Indonesia. *Pertama*, adalah gerakan yang bersifat moderat dalam arti secara politik tidak menawarkan alternatif radikal terhadap kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung. *Kedua*, adalah mereka yang secara radikal menawarkan alternatif landasan dan kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung, serta cenderung konfrontatif terhadap lawan dan kelompok moderat. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok radikal atau fundamentalis. Dalam pandangan teori sosial klasik-sosiologi, psikologi maupun politik, gerakan radikal sosial yang berbaur agama maupun tidak, akan dipandang sebagai suatu gerakan yang menyimpang (*defiance*), hal itu dikarenakan sikap, pandangan maupun perilaku sosialnya berbeda dengan *mainstream* masyarakat. Pandangan yang demikian ini dipengaruhi oleh teori struktural-fungsional. Teori ini beranggapan pada suatu pemahaman bahwa sebuah sistem masyarakat adalah sebagai suatu kesatuan. Elemen-elemen yang ada dalam sistem tersebut saling mendukung dan saling memperkuat untuk melanggengkan sistem sosial masyarakat. Gerakan radikalisme dari sudut ini dipandang sebagai penyimpangan terhadap keutuhan suatu sistem sosial.

Berdasarkan teori tersebut, maka aksi-aksi FUI yang ingin memberantas praktik-praktik yang menyalahi agama yang dilandasi atas pandangan keagamaan tertentu dan bersifat memaksakan kehendak bisa dikategorikan sebagai suatu gerakan yang menyimpang (*social deviance*). Meski selama ini tidak ada aksi-aksi FUI yang bersifat melawan

hukum atau berdampak menimbulkan korban dan kerugian milik pribadi atau fasilitas umum, namun pengerahan massa biasanya menimbulkan rasa cemas di masyarakat, karena rawan terjadi tindakan anarkisme massa, akibat sulitnya melakukan kontrol terhadap massa di lapangan. Namun demikian, jika ditinjau dari teori gerakan sosial maka aktivitas FUI merupakan hal yang wajar yang mempunyai tujuan politis. (Wiktorowicz, Quintan. 2012). Melalui teori gerakan sosial, para aktivis gerakan sosial Islam bukan lagi dianggap kaum fanatik liar dengan preferensi yang berbeda sama sekali dari para aktivis Barat. Mereka aktor rasional, merespons rangsangan dan membentuk gerakan dengan cara yang kurang lebih sama seperti para aktor lain di dunia (Wiktorowicz, Quintan.ed. 2012: 540).

Sebagaimana kelompok politik lain yang memanfaatkan sosial kapital yang dapat dipakai dalam menarik masa, gerakan FUI bisa dipandang sebagai upaya untuk memanfaatkan *sosial capital*-nya (agama, maupun modal sosial lainnya) untuk kepentingan politik tertentu. Fenomena kehadiran FUI Kota Bandung dengan aksi-aksinya dapat diartikan sebagai semacam strategi politik untuk meraih dukungan pemerintah dan masyarakat muslim. Jadi gerak FUI pada dasarnya adalah kelompok kepentingan politik yang sedang melakukan tawar menawar politik dengan menggunakan isu-isu agama. Pilihan melakukan dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap praktik-praktik yang menyalahi peraturan agama adalah pilihan rasional (*rational choice*) dalam masyarakat yang religius seperti Kota Bandung. Untuk itu jika dilihat dari sisi ini, maka FUI Kota Bandung adalah bagian dari kelompok-kelompok sosial yang sedang mengisi ruang publik (*public sphere*) dengan menyuarakan isu-isu agama. Dengan demikian, suara-suara keras FUI Kota Bandung dapat dimaknai sebagai bagian

bagi proses negosiasi sosial dalam merumuskan tatanan sosial yang mereka harapkan yaitu terwujudnya Bandung Kota Agamis. Namun demikian, keberadaan FUI sebagai bagian dari FSOI yaitu paguyuban ormas-ormas sosial keagamaan se-Kota Bandung yang menjadi mitra Pemerintah Daerah perlu dikritisi, karena kecenderungan umum gerakan sosial adalah merupakan bentuk alternatif atau semacam terobosan dari demokrasi representasi formal. Kedekatan gerakan sosial seperti FUI dengan kekuasaan perlu dikritisi karena biasanya yang terjadi kemudian adalah bahwa gerakan sosial tersebut cenderung bukan representasi keinginan dari konstituen melainkan sebaliknya, ia merupakan bentuk penundukan atau titipan dari struktur politik negara atau kekuasaan tertentu. (Cunningham, 2003)

Namun demikian, sejauh ini aspirasi dari kelompok gerakan sosial FUI Kota Bandung bersama komponen masyarakat lainnya relatif mampu mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung, seperti dalam kasus penutupan Saritem dan beberapa tempat perjudian. Keberadaan FUI sebagai bagian dari FSOI sementara bisa dimaknai sebagai sebuah aliansi strategis. Hubungan gerakan sosial dan penguasa dalam demokrasi yang sudah mapan tidaklah selalu harus bersifat antagonis, melainkan bisa jadi aliansi strategis dan saling menopang ketika ada titik temu.

Penutup

Kehadiran FUI Kota Bandung menurut para pendirinya adalah untuk menjaga motto Kota Bandung sebagai kota agamis dan untuk menjaga aqidah umat Islam dari upaya-upaya pihak luar yang ingin melakukan pemurtadan, serta meluruskan kesesatan yang dilakukan oleh kelompok sempalan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Meski dalam aksi-aksinya FUI cenderung memilih sikap keras, namun FUI Kota Bandung tetap menghormati empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu konsepsi ideologis dan wawasan kebangsaan FUI kota Bandung adalah termasuk gerakan yang bersifat moderat dalam arti secara politik tidak menawarkan alternatif radikal terhadap kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung. Dalam pandangan para pengurus FUI, berdakwah dengan baik dan berusaha menjalankan substansi Islam jauh lebih penting (prioritas) dan efektif dibanding upaya-upaya formalisasi Islam. Menurut FUI, pelaksanaan Syari'at Islam bersifat *buttom up* (dari bawah) oleh tiap individu muslim. Bila setiap muslim sudah melaksanakan hal tersebut, maka otomatis masyarakat dan Negara Islam akan terwujud.

Dalam perspektif teori gerak sosial, sikap FUI yang cenderung assertif (lugas) dalam menyuarakan anti kemaksiatan

merupakan pilihan politik yang wajar untuk melakukan proses negosiasi sosial dalam merumuskan tatanan sosial sesuai yang mereka harapkan, yaitu terwujudnya Bandung sebagai Kota Agamis adalah merupakan pilihan logis, karena dalam situasi dominasi neoliberalisme dan hegemoni Barat saat ini, pendekatan moderat dirasa tidak akan mampu memberikan kontribusi cukup untuk mengubah situasi ketidakadilan global dan juga lokal dan nasional yang saling terkait. Untuk itu radikalisasi gerakan melalui pendekatan keagamaan bisa saja diperlukan, namun dengan beberapa catatan, yaitu bahwa kecenderungan kalangan radikal atau fundamentalis Islam yang hanya memberikan satu-satunya pilihan, anti intelektualisme serta penafsiran tekstual terhadap agama dan dalam beberapa hal menghalalkan kekerasan, harus diberikan catatan kritis. Sama catatan kritisnya terhadap kecenderungan pembiaran ketidakadilan dan abainya kalangan moderat terhadap penindasan dan ketimpangan.

Daftar Pustaka

- An-Nai'm, Abdullah Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler. Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, terj. Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- Burke, E. and Lapidus I.M., et. al., *Islam, Politics, and Social Movements*. California: California University Press. 1988.
- Calhoun, Craig. *New Social Movements of the Early Nineteenth Century* dalam Nash Kate, *Reading in Contemporary Political Sociology*. Blackwell: Oxford, 2000
- Cunningham, David. *State versus Social Movement: FBI Counterintelligence Against the New Left*, dalam Goldstone, J.A (ed.), *States, Parties and Social Movements*. Cambridge: Cambridge University press, 2003
- Diani, Mario, 2000, "The Concept of Social Movement," dalam Nash, Kate, *Reading in Contemporary Political Sociology*, Blackwell, Oxford, hlm 154-176.
- Natsir, Muhammad. *Persatuan Agama dengan Negara, Arti Agama dalam Negara, dan Mungkinkah Al-Qur'an Mengatur Negara*, dalam M. Natsir, *Kapita Selekta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Suprpto, *4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Membangun Karakter Bangsa Indonesia Berdasarkan Wawasan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Bernegara LPPKB, 2010.

SETARA Institute, *Wajah Para 'Pembela' Islam*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.

Wiktorowicz, Quintan (ed.). *Gerakan Sosial Islam*, terj. Tim Penerjemah Paramadinah. Jakarta: Gading Publishing dan Paramadinah, 2012

Yunanto, S., et.al. *Gerakan Militan Islam*. Jakarta: The Ridep Institut. 2003

Zada, Hamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

Website :

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/06/29/m6dlrp-jelang-ramadhan-fui-minta-kawasan-saritem-ditutup>

<http://www.inilahjabar.com/read/detail/1877565/beroperasi-di-bulan-puasa-fui-ancam-bakar-saritem>

<http://www.antarajawabarat.com/lihat/cetak/24008>

<http://www.jpnn.com/read/2011/03/20/87261/FUI-Sambangi-Masjid-Ahmadiyah>

<http://bandung.detik.com/read/2011/02/01/125602/1557945/486/tv/tv/index.html>